

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Program Pemberdayaan masyarakat

Ada beberapa program pemerintah yang diluncurkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Program-program tersebut diantaranya adalah program Impres Desa Tertinggal (IDT). Program IDT dimulai pada tahun Pelita VI (TA. 1993/1994) dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 Juta setiap tahunnya. Dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Pada TA. 1995/1996 dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di desa tertinggal tersebut selain bantuan modal dan bantuan teknis, pemerintah dengan pihak donor dan Bank Dunia telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan program penanggulangan kemiskinan dengan membangun prasarana yang menyediakan akses dan prasarana penyedia air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal. Bantuan tersebut dinamakan Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Pada prinsipnya bantuan P3DT merupakan bantuan hibah ke masyarakat desa khususnya desa tertinggal melalui wadah LKMD, untuk 2 tahun (TA. 1995/1996 dan 1996/1997).

Pada tahun 1998 pemerintah meluncurkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK menyediakan bantuan secara langsung bagi masyarakat (BLM) sekitar Rp. 20 Juta hingga Rp. 1 milyar per kecamatan, tergantung dari jumlah penduduk. PPK memusatkan kegiatannya pada masyarakat pedesaan Indonesia yang paling miskin. Masyarakat desa kemudian bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dana tersebut. Hal itu dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan bersama dalam sejumlah forum musyawarah. Fase kedua PPK dimulai pada tahun 2003 dan berlangsung hingga tahun 2006. Dan fase ketiga PPK dimulai pada awal tahun 2006. (Wazdi, 2011)

Melihat keberhasilan PPK, pemerintah pusat bertekad untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang lebih luas, salah satunya dengan menggunakan skema PPK. Upaya itu diawali dengan peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada pertengahan tahun 2006 dan mulai berjalan pada tahun 2007. Program tersebut kemudian diresmikan oleh Presiden RI sebagai program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari

Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan PNPM-MP meliputi pembangunan sarana dan prasarana umum serta pengelolaan dana bergulir yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Perempuan dalam Program PNPM-MP adalah suatu kegiatan peminjaman dana secara bergulir kepada kelompok perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. kelompok perempuan mengajukan proposal permohonan bantuan dana. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 anggota kelompok yang terdiri dari ibu-ibu. (Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2011)

Setelah melalui tahap verifikasi dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) selanjutnya kelompok tersebut diberikan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,-. Pinjaman tersebut diberikan dengan jangka waktu 10 bulan dimana setiap bulannya kelompok peminjam wajib membayar bunga pinjaman sebesar 1,5 persen dari dana pinjaman yang telah diberikan. Bagi kelompok yang membayar bunga pinjaman sebelum jatuh tempo setiap bulannya akan diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebesar 2 persen dari angsuran pokok yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran atau

sebelum jatuh tempo angsuran kelompok tersebut telah lunas. Sanksi atau denda akan diberikan kepada kelompok yang mengalami permasalahan setelah diberikan toleransi 3 hari setiap tanggal jatuh tempo angsuran kelompok tersebut sebesar 1 persen per hari dikalikan dengan jumlah angsuran pokok. Jika anggota kelompok ada yang meninggal maka jaminan kematian akan diberikan kepada ahli waris tentunya dengan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan oleh UPK sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam MAD. (SK: Ketentuan Perguliran Kelompok SPP, 2011)

2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan (*trust*) oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimana yang akan datang akan sanggup memenuhi segala kewajiban yang telah di perjanjikan terlebih dahulu. Kadarsan (1995), mengemukakan bahwa kredit berasal dari bahasa latin “*Kredo*” berarti percaya. Inilah sebabnya sampai batas-batas tertentu dasar kredit adalah kepercayaan dari semua pihak yang bersangkutan dengan perkreditan tersebut. Kredit pada dasarnya tergantung pada tiga hal, yaitu: (1) kepercayaan bahwa posisi materi si peminjam mampu mengembalikan modal yang dipinjam tersebut, (2) kepercayaan bahwa si peminjam akan mengembalikan utangnya, (3) kepercayaan bahwa hukum-hukum yang sah dapat melindungi semua

pihak yang terlibat dalam transaksi kredit apabila ada yang dirugikan karena ada persyaratan yang dilanggar.

Terjadinya transaksi kredit antara lain dengan adanya suatu keinginan khususnya bagi para pengusaha yang untuk memperlancar usahanya yang mengalami kekurangan modal, maka dilakukan transaksi kredit, dimana transaksi kredit didasarkan kepada saling percaya. Menurut UU perbankan Nomor 10 tahun 1998 (dalam Kasmir, 2001) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa kredit berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (Kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.

Mubyarto (1995) mendefinisikan bahwa kredit adalah suatu transaksi antara pihak yang pertama disebut kreditor menyediakan sumber-sumber ekonomi berupa barang, jasa, atau uang dengan janji bahwa pihak kedua (debitur) akan membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan.

Kredit merupakan alat untuk menciptakan modal maka jenis dan macam kredit dapat dibagi sesuai dengan jenis dan macam modal yang diperoleh dari kredit itu. Kredit investasi adalah kredit yang dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang modal yang bersifat tetap yaitu

yang tidak habis dalam suatu proses produksi. Misalnya tanah, ternak, mesin dan lain-lain. Kredit yang tidak digunakan untuk investasi disebut kredit modal kerja misalnya untuk membeli pupuk, bibit dan pestisida atau untuk membayar upah tenaga kerja.

Pengertian kredit secara umum dapat diartikan sebagai kepercayaan. Kepercayaan bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu (Kasmir, 2001). Adapun tujuan pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana investasi ataupun dana untuk modal kerja dan dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Nasabah juga bebas dari perkreditan yang menetapkan bunga sangat tinggi.

Menurut Kasmir (2001) tujuan pemberian kredit adalah: (1) Mencari Keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah. (2) Membantu Usaha Nasabah, tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. (3) Membantu Pemerintah Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka makin baik, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Fungsi fasilitas kredit adalah sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan daya guna uang, (2) meningkatkan peredaran barang, (3) sebagai alat stabilitas ekonomi, (4) untuk meningkatkan kegairahan berusaha, dan (5) untuk meningkatkan pemerataan pendapatan (Kasmir, 2001).

3. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Pengembalian Pinjaman

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman ataupun kredit yang dikemukakan oleh para ahli. Diantaranya adalah menurut Kuntjoro (1983 dalam Shovariah, 2001) yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu program kredit tidak ditentukan oleh jumlah kredit yang diberikan kepada petani untuk menaikkan produksi, melainkan tingkat pembayaran kembali dari petani juga harus dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan tersebut.

Kuntjoro (1983 dalam shovariah, 2001) mengatakan perilaku petani dalam pembayaran kredit Bimbingan Massal (Bimas) padi ditentukan oleh beberapa karakteristik petani yang digolongkan dalam faktor internal diri pribadi petani, dan faktor eksternal yang berupa situasi ekonomi, situasi penunjang non ekonomi dan kondisi finansial. Dari hasil penelitian Kuntjoro tersebut diketahui bahwa faktor-faktor yang mempunyai hubungan erat dengan pengembalian kredit pada program bimas adalah faktor pribadi, status sosial, situasi ekonomi dan kondisi finansial. Faktor pribadi yang diukur meliputi umur petani, pendidikan petani, pengalaman berusaha tani, faktor lamanya turut Bimbingan Massa

(Bimas), faktor jumlah jiwa tanggungan petani dan faktor luas sawah yang diikutkan pada program Bimas.

Menurut Tohir (1991) dalam menganalisis kemaanfaatan suatu kredit tani yang perlu diperhatikan secara khusus ialah: (1) kemampuan usahatani untuk melunasi utangnya tepat pada waktunya, (2) imbangannya antara bagian kredit yang akan dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan bagian yang sungguh akan dipergunakan untuk usahatani, dan (3) besar dan jadwal penerimaan pendapatan dan pengeluaran.

4. Kelompok

Iver dan Page (1961 dalam Totok Mardikanto, 1993), menyatakan bahwa kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong. Selanjutnya Tomusua (1978 dalam Totok Mardikanto, 1993) mendefinisikan bahwa kelompok adalah suatu kesatuan sosial yang memiliki kepentingan bersama dan tujuan yang sama. Kelompok dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari dua atau lebih individu (manusia) yang memiliki ciri-ciri; (a) memiliki ikatan yang nyata, (b) memiliki interaksi dan interrelasi sesama anggotanya, (c) memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas, (d) memiliki kaidah-kaidah atau norma tertentu yang disepakai bersama, dan (e) memiliki tujuan dan keinginan bersama.

5. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007), Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Menurut (Notoatmojo 2003) pengetahuan yang cukup dalam mempunyai 6 tingkat yaitu :

1) Tahu (know) Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau dirangsang yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 2)

Memahami (Comprehension) Memahami diartikan sebagai sesuatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan dan menyebutkan. 3) Aplikasi (Aplication) Diartikan

sebagai sesuatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 4) Analisis (Analysis)

Diartikan sebagai sesuatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau sesuatu objek ke dalam sesuatu komponen–komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi. Dan masih ada kaitannya satu sama lain.

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti

dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 5) Sintesis (Synthesis)

Sintesis yang menunjukan kepada sesuatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. 6) Evaluasi (Evaluation) Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Rawati Nine Cahaya Sinaga dilakukan pada tahun 2006 dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kelancaran pengembalian kredit pada program pengembangan ketahanan pangan (PKP) di desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelancaran pengembalian PKP, untuk mengetahui tingkat pendapatan usahatani padi sawah dalam program PKP, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi tingkat kelancaran pengembalian PKP di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarka penelitian yang telah dilakukan tersebut diperoleh hasil bahwa tingkat kelancaran dalam pengambelia kredit PKP berada pada klasifikasi lancar yaitu sebesar 75 persen. Tingkat kelancaran pengembalian kredit PKP meliputi ketepatan jumlah dan ketepatan

waktu, ketepatan jumlah sebesar 91,66 persen dan ketepatan waktu sebesar 77,77 persen. Sedangkan untuk tingkat pendapatan petani padi sawah di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan rata-rata usaha tani per musim Rp 3.532.9369,81
2. Pendapatan rata-rata usaha tani per hektar Rp 3.140.73,-
3. Pendapatan rata-rata usaha tani atas biaya tunai Rp. 3.316.887,50
4. Pendapatan rata-rata usaha tani atas biaya total Rp. 2.772.462,-

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, serta pemanfaatan kredit mempengaruhi tingkat kelancaran dalam pengembalian kredit PKP sebesar 37,7 persen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

B. Kerangka Pemikiran

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam program PNPM Mandiri adalah pengelolaan simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok perempuan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Dengan keunggulan yang dimiliki SPP PNPM-MP seperti tingkat bunga yang rendah dan persyaratan yang tidak terlalu rumit kegiatan ini diharapkan mampu bermanfaat untuk mengembangkan usaha para anggota kelompok SPP serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para anggota sehingga tingkat kesejahteraan dari para anggota kelompok SPP akan meningkat.

Menurut Tohir (1991) dalam menganalisis kemanfaatan suatu kredit tani yang perlu diperhatikan secara khusus ialah: (1) kemampuan usahatani untuk

melunasi utangnya tepat pada waktunya, (2) imbangan antara bagian kredit yang akan dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan bagian yang sungguh akan dipergunakan untuk usahatani, dan (3) besar dan jadwal penerimaan pendapatan dan pengeluaran.

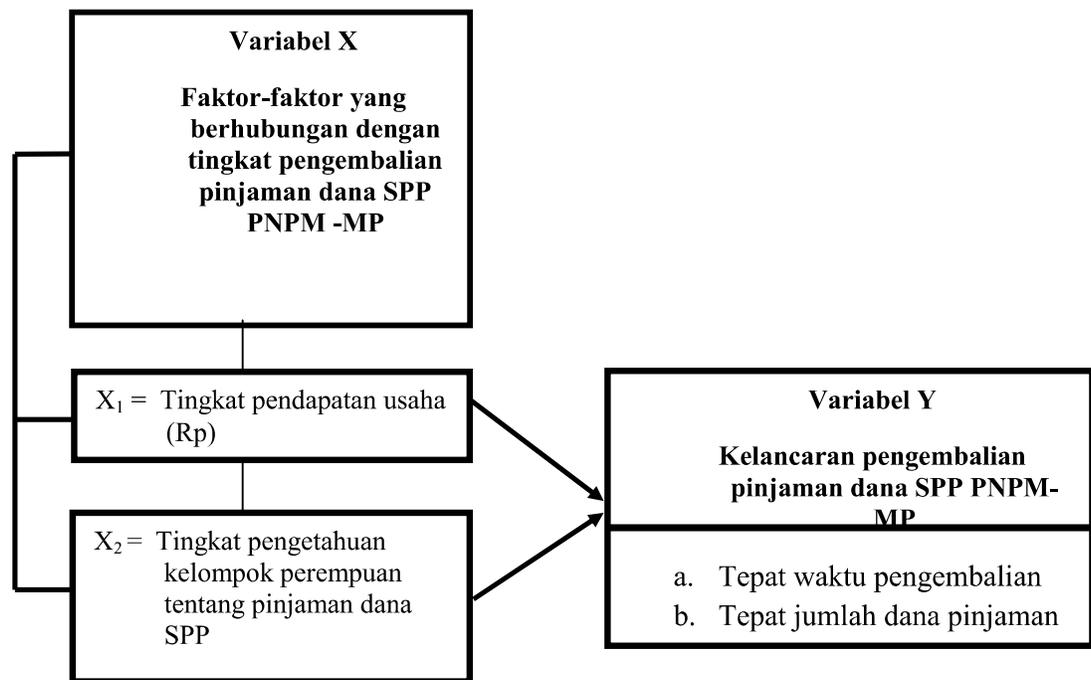
Berdasarkan uraian tersebut, kelancaran pengembalian dapat didefinisikan sebagai keberhasilan peminjam dalam mengembalikan kreditnya secara lancar (tidak menunggak) sesuai dengan jangka waktu dan jumlah pengembalian yang telah ditetapkan. Kelancaran pengembalian kredit tercermin dari kesanggupan peminjam dalam memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pinjaman secara tepat waktu dan jumlah. Dengan demikian pada penelitian ini tingkat pengembalian kredit pinjaman atau kelancaran pengembalian kredit pinjaman yang diidentifikasi sebagai variabel Y meliputi (a) Tepat waktu pengembalian dan (b) tepat jumlah dana pinjaman.

Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit pinjaman yang diidentifikasi sebagai variabel X mengacu pada hasil penelitian Rawati (2006) yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pengetahuan.

Pendapatan usaha adalah tingkat pendapatan peminjam dari hasil usaha dalam kurun waktu satu periode peminjaman. Tingkat pendapatan ini akan berpengaruh dengan tingkat pengembalian pinjaman dana SPP. Peminjam yang mendapatkan pendapatan dari usahanya memiliki peluang besar untuk mengembalikan pinjaman dana SPP, setelah memenuhi kebutuhan pokoknya kelebihan pendapatan menjadi ukuran dari kelancaran pengembalian pinjaman dana tersebut.

Tingkat pengetahuan peminjam terutama tingkat pengetahuan tentang pinjaman dana SPP diduga berhubungan dengan tingkat pengembalian pinjaman dana SPP. Bila tingkat pengetahuan baik, peminjam akan lebih bisa menerima menggunakan fasilitas pinjaman dana SPP dan pada akhirnya dapat melunasi kreditnya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diturunkan beberapa faktor yang terangkum sebagai variabel X yang diduga berhubungan dengan tingkat kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP pada program PNPM-MP. Variabel X tersebut meliputi (1) tingkat pendapatan usaha dan (2) tingkat pengetahuan kelompok perempuan tentang kredit. Beberapa indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit pinjaman dana SPP terangkum sebagai variabel Y yaitu: (1) ketepatan waktu, (2) ketepatan jumlah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan paradigma mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dengan tingkat kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP pada program PNPM-MP dapat dilihat pada Gambar 1.



Keterangan :

—————→ : Hubungan variabel yang diuji

Gambar 1. Paradigma hubungan tingkat pendapatan usaha dan tingkat pengetahuan kelompok perempuan tentang pinjaman dana SPP dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM –MP.

C. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ada hubungan nyata antara tingkat pendapatan usaha dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP.
2. Diduga ada hubungan nyata antara Tingkat pengetahuan kelompok perempuan tentang pinjaman dana SPP dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP.